

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abadi Husnu, Hajri Wira, (2017). *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, Penerbit: Deepublish.

Bachtiar, (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Boix Carles, Stokes Susan, (2021). *Pemisahan Kekuasaan: Handbook Perbandingan Politik*, Perpustakaan Nasional RI.

Budhiati Ida, (2021). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ence, Baso Iriyanto, (2018). *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: PT. Alumni.

Harma Benny, (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, halaman 113.

Huda Ni'matul, (2011). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.

Jimly Asshiddique, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kansil, (1998). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Levy Leonard, (2005). *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Bandung: Penerbit Nusamedia.

Lev Daniel, (2018). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2009). *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif (Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010)*, Jakarta,

Martitah, (2023). *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press.

Mujiburohman Dian, (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Perpustakaan Nasional.

Nasution Mirza, Saragih Geofani, (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengantar Dasar*, Jakarta: Kencana.

Nugraha Satriya, (2024). *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Kalimantan: Ruang Karya.

Rahardjo Satjipto, (2014). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahman Faiz, Wicaksono Dian, (2022). *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Rishan idul, (2013). *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press.

Safi'I, (2021). *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Saragih Geofani, Indra Mexsasasi, Artina Dessy, (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang terhadap UUD'45*, Depok: PT Rajagrafindo.

Siahaan, Maruarar, (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soehino, (2013). *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty

Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres.

Soimin, Mashuriyanto, (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Sugiarto, Said Umar, (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Thalib Abdul Rasyid, (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

b. Jurnal

Andiraharja Ginanjar Diyar, 2021, “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2. Hlm. 74

Audha Emerald Magma, 2021, “Purifikasi Judicial review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2. Hlm. 173.

Hakim Arief, Pratiwi Yulita, 2022, “*Positive Legilsature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 4. Hlm. 937.

- Marzuki Laica, 2004, “*Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 3. Hlm. 3
- Rohmah Elva, Ilmiyah Zainatul, 2024. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1. Hlm. 119.
- Sanjaya Mohammad, 2023, “Kajian Filosofis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan yang Dilakukan Negara Dalam Menjalankan Kewenangannya”, *Fakultas Hukum Universitas pasundan*. Hlm. 2
- Saraswati Retno, 2013, “Problematisa Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No. 3. Hlm. 99
- Sari Adena, Raharjo Purwono, 2022, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 1. Hlm. 682
- Simamora Janpatar, 2013, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 3. Hlm. 389.
- Subandri Rio, 2024, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2 No. 1. Hlm. 135
- Sutiyoso Bambang, 2010, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6. Hlm. 26
- Tamungku Efer, Rumokoy Donald, Palilingan Toar, 2023, “Penerapan Praktif Inkonstitusional Bersyarat di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XII No. 1. Hlm. 3

Umboh Christiani, 2020, “Penerapan Konsep Tria Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII No. 1. Hlm. 3.

Wahid Abdul, 2022. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?”, *Jurnal Isu Constituendum*, Vol 7 No. 2. Hlm 315.

Yasin Ikhsan, 2018, “Keadilan Substantif Dalam *Ultra Petita* Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 15 No. 1. Hlm. 18.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang_undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian terhadap Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 049/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang_undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

d. Kamus

Black's Law Dictionary (Fifth Edition).

e. Website/Internet

DKPP RI “DKPP Dengarkan Keterangan Saksi Ahli dalam Sidang 4 Perkara KPU RI”, 16 Januari 2024, <https://dkpp.go.id/dkpp-dengarkan-keterangan-saksi-ahli-dalam-sidang-4-perkara-kpu-ri/>

Kartika Mimi,”Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 30 Agustus 2024, <https://testing.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>

f. Sumber-Sumber Lain

Armawan, “Putusan 90/PUU-XXI/2023: Sisi Lain Rapat Permusyawaratan Hakim, Hak Dissenting dan Refleksi Para Negarawan”.

Esfandiari Fitria, Hamidi Jazim, Fadil Mohammad, “*Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi di indonesia”, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Fatwa Indra, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berfiat Mengatur (*Positive Legislature*) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif”, Universitas Islam Indonesia.